



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 12.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F- Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos /Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Pembahasan LKPP APBN TA. 2022 (RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA. 2022),
2. Pembahasan Asumsi Dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2024 dilanjutkan penetapan,
3. Pengantar RKA-K/L TA. 2024
Hadir : 30 orang anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T.
3. Maman Abdurrahman, S.T
4. Bambang Haryadi, S.E.
5. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Mercy Chriesty Barends, S.T.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph
5. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. H. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin.
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto.
2. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T, BE (Hons), M. Eng.Sc.
3. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc, M. Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si.
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Muhammad Nasir.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I. Pol

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Ir. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Mari kita mulai Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan segenap jajarannya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, ini hadir Pak Bambang orang sering menyebut Pak Bambang tupai entah kenapa tapi setelah haji saya kira Haji Bambang *lah*, kita sepakat ya kita sebutnya Haji Bambang. Hadir juga Pak Eddy Suparno dan juga Pak Donny Oekon akan segera bergabung dan nanti Pak Maman Abdurahman juga akan segera bergabung.

Yang kami hormati juga Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, hari ini sungguh luar biasa kita semuanya semangat termasuk yang forumnya cukup lengkap, Yang kami hormati sudah barang tentu Menteri ESDM beserta jajarannya, serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama pasti kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat* dan bahwa Covid sudah berlalu tetapi kita terus waspada dengan kesehatan kita harus jaga terlebih kita harus menjadi perhatian kita, Jakarta adalah salah satu kota terpolusi di dunia ini juga menjadi apa harus menjadi pusat perhatian kita semua.

Baiklah Bapak-Ibu semua.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, serta Menteri ESDM Republik Indonesia beserta jajarannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI. Sesuai undangan bahwa hari ini berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023-2024, pada hari ini Komisi VII

DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, dengan agenda:

1. Pembahasan LKPP APBN Tahun Anggaran 2022, ini RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022,
2. Pembahasan asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN Tahun 2024, dilanjutkan dengan nanti penetapan, Ketiga, Bapak-Ibu sekalian, agenda hari ini adalah
3. Pengantar Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Berdasarkan data sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 22 anggota dari 51 anggota dan terdiri dari atas 8 fraksi dari 9 fraksi. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, pimpinan meminta persetujuan agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan yang dan bersifat terbuka. Apakah disetujui?

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan anggota. Maaf atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dengan demikian, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Untuk selanjutnya kita sepakat bahwa rapat ini akan kita selenggarakan kurang lebih 2 jam dari sejak kita mulai, kita terbuka dan apabila dinyatakan perlu untuk diperpanjang nanti atas persetujuan kita bersama, setuju Bapak-Ibu sekalian?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, itu ada lain-lain *nggak*? Saya pikir menteri perlu menjelaskan banyaknya persoalan-persoalan hukum di Kementerian ESDM, publik mengharapakan itu. Kira-kira ada lain-lainnya *nggak gitu*?

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini kebetulan jadwalnya rapat kerja.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Iya, makanya itu saya tanya Pak Ketua, fokusnya berturut-turut saya lihat ini masalah-masalah hukum di sekitar Kementerian ESDM.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, ini kita batasi dulu ya Pak Ramson ya kita fokus kepada rapat kerja.

Terima kasih Pak Ramson atas masukannya.

Setuju Bapak-Ibu sekalian ya? 2 jam kurang lebih.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sebagai sektor yang sangat vital Kementerian ESDM harus memiliki tata kelola dan pengelolaan keuangan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN berupa laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP harus disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia untuk diperiksa dan di audit.

Pada tahun ini Kementerian ESDM kembali memperoleh predikat tertinggi wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-7 kalinya atas laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM atas pencapaian tersebut. Komisi VII DPR RI juga berharap Kementerian ESDM dapat mempertahankan opini WTP serta menindaklanjuti temuan-temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Bapak-Ibu sekalian.

Kemudian pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI pada 5 Juli tahun 2023 yang lalu, Komisi VII DPR RI telah menyetujui *range* asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024. Kemudian dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah mengajukan asumsi dasar diantaranya harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan sebesar 80 US dolar per barel, *lifting* minyak sebesar 625.000 barel per hari dan *lifting* gas sebesar skala barel 1,33 juta barel per hari.

Komisi VII DPR RI sangat mendorong optimisme agar *lifting* migas tahun depan dapat lebih tinggi dan dapat tercapai, mengingat bahwa kita memiliki target minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Selain itu pemerintah harus dapat meningkatkan eksplorasi untuk *giant discovery* dan terus menggenjot produksi lapangan minyak dan migas yang sudah ada.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Agenda selanjutnya adalah Komisi VII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon 1 Kementerian ESDM Republik Indonesia yang diawali dengan pengantar rencana kerja anggaran kementerian/lembaga, Kementerian ESDM tahun 2024 oleh Menteri ESDM.

Untuk efektifnya waktu, pimpinan mengusulkan dan meminta persetujuan Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi VII DPR RI agar kita tuntaskan agenda pertama dan kedua yaitu pembahasan LKPP APBN tahun anggaran 2022 dan pembahasan asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN tahun 2024, sekaligus penetapan asumsi dasar sektor ESDM. Setelah itu baru kita masuk ke dalam agenda pengantar rencana kerja anggaran kementerian/lembaga tahun 2024, disetujui Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu sekalian.

Untuk efektifnya waktu kami persilahkan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya, dipersilakan.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Bapak-Ibu para Anggota Komisi VII DPR RI,
Para peserta rapat yang hadir dalam rapat kerja pada pagi hari ini, kepada Direksi BUMN Pertamina dan PLN, serta hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat kerja dengan agenda:

1. Pembahasan LKPP APBN Tahun Anggaran 2022, ini terkait dengan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, kemudian dilanjutkan dengan
2. Pembahasan asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2024 dan kemudian nanti sesudahnya akan juga disampaikan
3. Pengantar RKAK/L Tahun Anggaran 2024.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Kami mulai dengan penjelasan terkait dengan LKPP APBN tahun anggaran 2022, Kementerian ESDM selalu menyajikan laporan keuangan



sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan selama 7 tahun berturut-turut memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI karena hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Bapak-Ibu sekalian.

Kementerian ESDM telah berkontribusi dalam memberikan penerimaan kepada negara. Hal ini terlihat dari realisasi PNBP bagian anggaran 020 selalu melebihi target, dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai 2022 PNBP bagian anggaran 020 mencapai angka capaian sebesar 110 sampai 423%. Pada tahun 2023 realisasi PNBP BA 20 Kementerian ESDM sampai dengan 28 Agustus adalah sebesar 123,09 triliun atau 115% dari target.

Anggaran Kementerian ESDM dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2022 berada pada kisaran 4,8 sampai 6,6 triliun. Pada tahun 2022 realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 5,6 triliun atau 97,4% dari pagunya yang sebesar 5,7 triliun. Realisasi anggaran 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan.

Kemudian laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2022 mengungkapkan neraca laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Terdapat 4 temuan pemeriksaan signifikan dalam LKPP tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi yaitu:

1. Temuan BPK terkait dengan potensi penerimaan negara dari jaminan kesungguhan dan denda administrasi keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian yang belum dapat diukur nilainya. Terkait hal ini Kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun masih belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu:
 - 1) Telah disampaikan surat tagihan penempatan jaminan kesungguhan kepada 12 badan usaha penerima rekomendasi ekspor mineral logam.
 - 2) 3 badan usaha telah menempatkan sebagian jaminan kesungguhan, masih belum lunas dan 9 badan usaha belum menempatkan jaminan kesungguhan. Akan segera dilakukan teguran dan sanksi kepada 12 badan usaha yang belum menempatkan dan belum melakukan pelunasan penempatan jaminan kesungguhan.
 - 3) Total kewajiban penempatan jaminan kesungguhan adalah sebesar 506,57 juta US dolar telah dibayarkan 56,92 juta dolar sehingga sisanya masih ada 449,65 juta US dolar.
 - 4) Terbitnya Kepmen ESDM Nomor 89K/MB01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administrasi Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Logam di dalam negeri sedang dilakukan perhitungan kembali denda keterlambatan kepada 12 badan usaha yang telah menerima rekomendasi ekspor dengan mempertimbangkan laporan verifikasi kemajuan fisik terdampak Covid-19 oleh verifikator independen yang telah disampaikan badan usaha.



2. Kemudian temuan yang kedua dari BPK adalah penerapan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 pada aplikasi e-PNBP belum optimal karena sebanyak 60 transaksi belum dikenakan tarif sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan potensi kurang bayar royalti dan penjualan hasil tambang sebesar 118,11 miliar dan 23,03 juta US dolar.

Terkait hal ini Kementerian ESDM telah menindaklanjuti, namun masih belum sesuai dengan rekomendasi yaitu:

- 5) Telah dilakukan pengembangan e-PNBP versi 2 dan dalam proses pengajuan *review* oleh Inspektorat Jenderal.
 - 6) Terdapat 60 transaksi yang berasal dari 2 perusahaan, yaitu Kaltim Primaco 10 transaksi dan Arutmin Indonesia 50 transaksi. Untuk KPC telah dilakukan verifikasi pemeriksaan PNBP sepanjang tahun 2022 dan telah dibayar seluruhnya, sedangkan PT Arutmin Indonesia masih dalam proses verifikasi, sisa saldo temuan adalah 117,42 miliar dan US dolar 11,65 juta dolar.
3. Kemudian temuan BPK yang ketiga terkait dengan pembayaran belanja pegawai tahun 2022 pada Ditjen Minerba melebihi ketentuan minimal sebesar 7,19 miliar karena adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Terkait hal ini Kementerian ESDM telah menindaklanjuti masih belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu:

- 7) Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas kepatuhan pembayaran tunjangan kinerja, honorarium pelaksanaan kegiatan, perjalanan dinas, belanja bahan dan belanja operasional di lingkungan Kementerian ESDM.
 - 8) Telah terbit Kepmen ESDM Nomor 152K/KP05 2023 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Aparatur Sipil Negara bagi pegawai yang menjadi tersangka tindak pidana dan perbaikan tata kelola pembayaran tunjangan kinerja melalui Surat Edaran Nomor 5E/KU01 2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.
 - 9) Selanjutnya Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan berkala atas pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja tersebut.
4. Kemudian temuan BPK yang keempat, perubahan spesifikasi ketebalan pipa diameter 20 inchi pada pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tahap 1, Semarang-Batang belum disertai penetapan nilai efisiensi dan belum didukung addendum kontrak sehingga negara belum memperoleh manfaat atas perubahan spesifikasi tersebut di tahun 2022.

Terkait hal ini Kementerian ESDM telah menindaklanjuti namun masih belum sesuai rekomendasi, di mana perubahan spesifikasi ketebalan pipa 20, diameter 20 inchi telah dilakukan *assessment* oleh pihak profesional dan independen yaitu



professional *engineer* yang ditunjuk oleh kerjasama operasi dan *risk analysis* oleh perusahaan *engineering*.

Berdasarkan laporan hasil review BPKP tanggal 13 April 2023 telah dilakukan pembahasan dan disepakati nilai efisiensi sebesar 31,29 miliar yang dituangkan dalam addendum kontrak tanggal 11 Agustus 2023. Addendum kontrak telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan ditindaklanjuti melalui kartu Pengawasan Kontrak Karwas.

Demikian kami sampaikan terkait dengan agenda pertama LKPP temuan dari BPK.

Selanjutnya kami sampaikan asumsi dasar tahun 2024, Kementerian ESDM mengusulkan asumsi dasar tahun 2024 sesuai dengan pidato Presiden RI pada penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 tanggal 16 Agustus 2023 beserta nota keuangan, yaitu:

- a. ICP sebesar 80 US dolar per barel, hal ini didasari atas realisasi rata-rata ICP Januari sampai dengan Juli 2023 sebesar 75,21 US dolar per barel dan ada kecenderungan menurun serta berdasarkan proyeksi *polling reuters* dan *short term energy outlook* dari *United States Energy Information Administration Department of Energy*, harga minyak dunia di tahun 2024 diperkirakan ada pada kisaran 78,51 US dolar sampai dengan 83,67 dolar per barel.
Selain itu, faktor yang akan mempengaruhi harga minyak, antara lain: pertumbuhan ekonomi global yang melambat dengan inflasi yang tinggi di beberapa negara, OPEC plus akan melakukan kontrol pasokan minyak dan masih terjadinya krisis geopolitik Rusia-Ukraina.
- b. Kemudian terkait dengan *lifting* minyak dan gas bumi, *lifting* minyak dan gas bumi pada RAPBN 2024 diusulkan sebesar 1.658.000 BOEPD, yang terdiri dari minyak bumi sebesar 625 ribu barel oil per *day* dan gas bumi ekuivalen dengan 1.033.000 oil ekuivalen per *day*. Kemudian terdapat potensi tambahan produksi minyak bumi tahun 2024 sebesar 10.762 barel per hari yang berasal di antaranya dari proyek Tangguh Train 3, optimalisasi pengembangan lapangan-lapangan Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan juga operasi pengembangan lapangan-lapangan Sanga-Sanga Ramp up, lapangan Haur Gede.
Di sektor gas bumi potensi tambahan produksi tahun 2024 adalah sebesar 329,78 miliar standar kubik per *day*. Tambahan tersebut diantaranya berasal dari proyek Tangguh 3, OPLL Sanga-sanga, proyek dayung *facility* dan optimalisasi, proyek optimalisasi fasilitas produksi Anoa Hub dan Plan of Development Central Secanggang.
- c. Untuk *cost recovery* dengan memperhatikan realisasi *cost recovery* hingga bulan Juli 2023 sebesar 4 miliar US dolar atau 48% dari target APBN sebesar 8,25 miliar US dolar dan *outlook* tahun 2023 sebesar 8,2 miliar US dolar pada RAPBN 2024 *cost recovery* yang kami usulkan adalah sebesar 8,25 miliar US dolar.



- d. Kemudian terkait dengan volume BBM dan LPG bersubsidi, kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 19,58 juta kiloliter, yang terdiri dari minyak tanah sebesar 0,8 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 19 juta kiloliter.

Arah kebijakan subsidi BBM adalah pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi untuk minyak tanah, serta melanjutkan *roadmap* registrasi konsumen pengguna BBM.

Mencermati realisasi sampai dengan bulan Juli 2023 dan *outlook* 2023 kami mengusulkan volume LPG 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton. Arah kebijakan elpiji yaitu melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG tabung 3 kilogram ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

- e. Selanjutnya subsidi tetap minyak solar, dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 kami mengusulkan subsidi tetap untuk minyak solar sebesar Rp1.000,- per liter. Hal ini perlu dilakukan mengingat harga keekonomian minyak solar mencapai Rp11.250,- per liter, sedangkan harga jual eceran sebesar Rp6.800,- per liter. Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro dan pelayanan umum sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar.
- f. Selanjutnya terkait dengan subsidi listrik, subsidi listrik pada RAPBN 2024 diusulkan sebesar 73,24 triliun dengan asumsi ICP 80 US dolar per barel dan nilai tukar sebesar Rp15.000,- per dolar. Kebijakan subsidi listrik tahun 2024 yaitu memberikan subsidi listrik kepada golongan yang berhak, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan, dan mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikianlah terkait dengan 2 isu pertama yang kami sampaikan, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pimpinan untuk mekanisme selanjutnya.

Terima kasih.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)



KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih atas paparan dan penjelasannya Pak Menteri.

Dan selanjutnya untuk menyingkat waktu karena kita masih ada satu agenda terakhir, agenda terkait pengantar RKAK/L. Langsung pada teman-teman Anggota Komisi VII untuk bisa menanggapi secara singkat terkait agenda pertama, yaitu LKPP Kementerian ESDM RI yang sudah disampaikan Pak Menteri dan kita mengapresiasi Pak Menteri karena sudah 7 kali, tolong kita berikan tepuk tangan atas WTP.

Untuk menyingkat waktu kami persilahkan Pak Mul dulu, kita langsung ke Pak Mul PKS yang dari tadi udah pesan, asumsi makro boleh bisa langsung sekaligus biar bisa cepat karena Pak Menteri ada agenda lain sebentar lagi ya.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Seizin Pimpinan, Pak Tifatul.

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang kami hormati dan teman-teman sekalian.

Saya tidak panjang lebar Pak, hanya ingin memastikan interaktif sedikit Pimpinan karena sangat penting. Ingin memastikan Pak Menteri, ada atau tidaknya rencana kenaikan BBM bersubsidi? Karena ada menteri saya baca yang bukan bidang tugasnya menyatakan akan ada kenaikan, *nah* ini membuat kita resah di masyarakat.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin interaktif Pak. Apakah ada rencana atau tidak kenaikan BBM, prognosisnya sama sekali *nggak* ada potensi untuk kenaikan menurut kami.

Mohon interaktif Pimpinan.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Pak Mul.

Belum ada itu.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Nggak ada, mudah-mudahan wartawan juga apa bisa mendengar termasuk subsidi Pertamina juga *nggak* ada ya Pak Menteri ya.

Baik, saya ingin menanyakan yang terkait asumsi makro, Pimpinan. Ya langsung, asumsi makro, jadi beberapa poin yang kami catat perkembangan



selama ini, yang pertama adalah prognosis terhadap gas LPG 3 kilogram, jadi angkanya ini terakhir itu sudah menjadi data yang kami terima dari Pak Menteri, maupun dari Pertamina kurang lebih mirip.

Prognosisnya menjadi 8,22 *kan* itu ya, Pertamina 829, 8,22 di sini tapi kalau Pertamina 8,28 sedikit ada perbedaan *oke lah*. Namun di dalam nota keuangan usulannya untuk 2024, 8,03, *nah* ini *kan* mepet banget ini iya *kan* Pertamina berarti kurang *gitu*. Oleh karenanya yang logisnya kami mengusulkan angka 8,5.

Yang kedua, terkait juga ICP yang memang sejak bulan tahun 2022 Juli ya tinggi sekali di atas 150-an tapi terus turun, turun, akhirnya naik lagi sedikit. Akhirnya naik di angka 80 lebih sedikit, memang rata-ratanya masih 70 sekian. *Nah* sekarang *kan* di nota keuangan asumsi makronya baru 80, *nah* kami mengusulkan dinaikkan sedikit supaya agak aman itu, 85 atau 82 kurang lebih segitu *lah* supaya agak lebih sedikit leluasa.

Yang ketiga, terkait *lifting*. *Nah* ini *kan* APBN kita 2022 *kan* angkanya 660, sekarang di nota keuangan menjadi 625 ini juga terlalu jomplang. Kami mengusulkan agar ada semangat 1 juta barel itu *loh*, jadi jangan terus turun, turun, turun. Kami mengusulkan ya 640, 630 sekitar se-*gitu*, kami mengusulkan dari Fraksi PKS.

Saya rasa itu Pimpinan, dari kami.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Mul.

Kalau udah PKS ini memberikan *support* yang luar biasa, gimana yang partai koalisi. Saya pikir itu ya *nggak* perlu didalami lagi, kita tanggapin, masih ada? Karena kalau PKS sudah mendukung *nih* gimana partai pemerintah.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan, tambah sedikit.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sedikit ya karena kita akan tanggapin LKPP-nya, kita setuju apa kita terima atau *nggak gitu* ya.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Baik, terima kasih Pimpinan.



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran dan seluruh hadirin yang pada raker pada hari ini.

Yang pertama-tama tentu kita memberikan apresiasi kepada Menteri Kementerian ESDM yang 7 kali berturut-turut WTP, terus juga kenaikan PNBP juga melampaui target. Itu satu hal yang kita apresiasi melebihi target, 5 tahun terakhir ini tentu ini memicu kita ke depan agar Kementerian ESDM lebih giat lagi untuk menarik PNBP.

Saya terus terang Kementerian ESDM ini memang sumbernya pendapatan negara ini memang sebagian besar dari ESDM, energi dan sumber daya mineral. Jadi oleh karena itu tentu kita *support* dalam rangka ESDM untuk meningkatkan PNBP.

Dan secara umum laporan tentang LKPP 2022 Fraksi Golkar menilai ini cukup baik capaian-capaiannya, oleh karena itu kami menganggap ini suatu hal yang perlu kita apresiasi dan bisa menerima laporan ini dan kita bisa lanjutkan untuk kita bisa buat kesimpulan sebagai kesimpulan kita bahwa LKPP ini bisa kita terima dan kita lanjutkan pada pembahasan 2024.

Yang kedua terkait dengan asumsi, asumsi makro 2024 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentu apa yang telah disampaikan oleh Fraksi PKS pada prinsipnya kita hampir sama cuma ada perubahan-perubahan sedikit ya tentang angka-angka yang disampaikan.

Yang pertama terkait dengan masalah ICP, memang dalam APBN 2024 nota keuangan *kan* 80 ya, ada kecenderungan memang agak naik, terakhir sempat turun, naik lagi. Oleh karena itu dari Fraksi Golkar mungkin kita agak moderat sedikit lah 82,5 atau 83 *lah*, kira-kira nanti kompromi seperti apa, kita nanti simpulkan pada hari ini.

Kemudian yang terkait dengan *lifting* ya, *lifting* memang *lifting* minyak khususnya itu *kan* dalam 2023 kita 660 ya, 660, kemudian dalam 630. Saya kira kalau *clear* dari kinerja ke depan ya dengan eksplorasi oleh Pertamina, segala macam kita memang agak sedikit coba dipicu sedikit untuk menaikkan ICP, *lifting* ini. Oleh karena itu FRAKSI Golkar mengusulkan ke 630 ya untuk *lifting* minyak bumi.

Untuk gas juga *kan* kita cenderung naik terus *nih* untuk gas dari tahun ke tahun dan kita dalam RAPBN 2024 dalam nota itu 61.033. Saya kira ini kita realistis ya sama saja dengan 61.033. Kemudian *cost recovery* saya kira kita sama saja dengan pemerintah 8,25 catatan dari Golkar.

Yang terakhir terkait dengan apa namanya subsidi LPG 3 kilo, kalau kita lihat perkembangan ya ternyata memang kenyataannya memang sudah terjadi

over kuota ya tahun 2023. Kemarin kita RDP dengan Pertamina sudah di 828, 8,28 tentang target realisasi kita untuk LPG 3 kilo.

Dan melihat tren pertumbuhan ekonomi kita ke depan karena *recovery* kita sudah semakin membaik, dengan tema HUT kemerdekaan terus melaju untuk Indonesia maju. Saya kira ini pasti pertumbuhan ekonominya akan naik dan ini akan memicu terhadap daripada kebutuhan energi, khususnya LPG.

Oleh karena itu Fraksi Golkar juga mendorong agar ada kenaikan daripada kuota daripada LPG 3 kilo menjadi 8,5. Kira-kira kompromi seperti apa nanti 8,5 ada hitung-hitungannya kira-kira, supaya ini tidak sampai terjadi seperti *over* kuota seperti sekarang. Ternyata kan sudah melebihi juga dari sekarang tahun 2023.

Kemudian hal-hal lain hampir sama dengan pemerintah, prinsipnya kita mendorong agar APBN 2024 di samping kita tetap menghadapi ketidakpastian global yang masih sangat tinggi, tapi kita tetap optimis ini APBN kita akan ekspansif ke depan. Sehingga kita perlu angka-angka yang optimis dalam postur ataupun dalam asumsi makro kita 2024.

Saya kira itu, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan Ibu Ratna Jelita, *oh Juwita* ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang dan Wakil Ketua Komisi VII,
Yang kami hormati sahabat-sahabat Komisi VII,
Yang kami banggakan Pak Menteri beserta segenap jajarannya.

Terima kasih Pak atas tadi penjelasannya, kalau terkait LKPP mungkin yang disampaikan oleh Pimpinan sudah cukup mewakili begitu ya. Bahwa WTP selama 7 tahun berturut-turut itu bukan sebuah hal yang mudah, tapi ternyata Kementerian ESDM bisa memberikan prestasi tersebut. Sehingga saya berharap bahwa opini WTP ini tidak hanya di LKPP-nya saja Pak, tapi juga diikuti di KPI kinerja dan lain-lain begitu sehingga Kementerian ESDM juga bisa kami banggakan sebagai mitra dari Komisi VII.

Yang berikutnya Pak, terkait pencapaian PNBP tadi sudah disampaikan oleh senior kami dari Golkar Pak Mukhtarudin, bahwa memang hari ini PNBP kita yang terbesar diberikan oleh Kementerian ESDM. Meskipun ternyata

pencapaian tersebut tidak diikuti dengan keberpihakan anggaran untuk Kementerian ESDM.

Jadi kami sendiri khususnya Komisi VII yang ditugaskan di Badan Anggaran begitu Pimpinan, kami selalu *on hand* begitu ya berusaha untuk meminta kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini agar memberikan proporsi yang lebih baik begitu *lah* kepada Kementerian ESDM.

Tapi Pak kami di sini ingin sedikit meng-*highlight* ya terkait temuan BPK, meskipun ini jumlahnya sedikit hanya 4 yang belum sesuai *gitu*, tapi ternyata setelah kami hitung-hitung yang di halaman 9 sampai 12 itu Pak, kalau dirupiahkan itu yang rupiah ketemunya 148 miliar sekian, lalu yang US dolar Pak termasuk yang jaminannya itu tadi itu kami hitung itu ada sekitar 8,9 triliun.

Jadi kami berharap semoga Kementerian ESDM juga segera bisa melakukan strategi-strategi khusus untuk mengejar apa yang menjadi temuan BPK ini, *toh* ini nantinya juga akan kita elaborasi sebagai pendapatan negara juga begitu. Sehingga kami berharap Kementerian ESDM bisa bergerak cepat terkait temuan ini, *kan deadline*-nya Oktober ya Pak, Oktober 2023 begitu ya, kami berharapnya demikian.

Untuk asumsi dasar Pimpinan, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memiliki sedikit juga usulan. Tadi kalau yang ICP karena kita udah koalisi begitu, kita ngikut *lah* sama Golkar *gitu* di 8,2 boleh *lah*. Tapi untuk yang *lifting* Pimpinan, kami memiliki persepsi sendiri begitu karena acuan kami dengan adanya *rebound* yang lebih baik di dunia perekonomian, utamanya di investasi terkait migas kami sangat optimis bahwa ini masih bisa ditingkatkan kembali begitu. Apalagi belum ganti ya Pak Kepala SKK ya target 1 juta barel itu belum ganti *kan* di 2030 *gitu*, jadi kami berharapnya ini ada di angka optimis 650 sampai 680, ya 650 *lah*.

Untuk terkait *cost recovery* Pimpinan, kami sepakat dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah di 8,25 karena kami juga melihat bagaimana tadi penyerapannya. Dan terkait subsidi LPG tadi betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter Mul dan Pak Mukhtarudin. Hari ini memang LPG ini menjadi *backbone* dari semua sektor UMKM yang ada di Indonesia, baik itu dari sisi makanan maupun yang lainnya karena ternyata di peternakan itu juga menggunakan LPG yang 3 kilogram, Pimpinan. Sehingga kami berharap bahwa kuotanya bisa kita perkuat begitu, bisa kita tambah di 8,5 juta metrik ton.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan, *oh* ya terkait yang subsidi listrik. Kami sangat sepakat tadi *stressing* yang disampaikan oleh Pak Menteri begitu bahwa ini harus berbasis pada sasaran penerima dan penggunaannya begitu.

Terima kasih, itu saja dari kami.

Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.



*Wallahulmuwafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA
KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Ibu Andi dulu, Bu Andi dulu yang senior.

Silakan Bu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,
Pak Menteri, mudah-mudahan Pak Menteri sehat Pak ya *alhamdulillah* dan seluruh dirjen beserta jajaran, hadir juga ikut Ibu Dirut Pertamina, Pak Dirut PLN, BPH Migas, SKK Migas.

Pertama ya selamat untuk WTP, walaupun kalau kita bicara detail ternyata catatannya juga agak ngeri-ngeri juga Pak dari BPK, terutama di halaman 11 tentang temuan di Direktorat Jenderal Minerba ini juga cukup menjadi *trending topic*. Nah kira-kira nanti kedepannya apa yang harus dilakukan, walaupun di sini BPK sudah merekomendasikan untuk melakukan reviu atas sistem pengendalian intern pengelolaan belanja pegawai, dari dulu *kan* selalu saya teriak soal belanja pegawai ya pada seluruh satker dan sudah menerapkan sanksi kepada kepegawaian, ini penting juga begitu juga temuan-temuan yang lain.

Kemudian untuk asumsi dasar sektor ESDM, saya untuk *lifting* minyak bumi mengusulkan 650, Pak. Walaupun saya mengapresiasi bahwa subsidi listrik ini sudah cukup meningkat dengan signifikan 73,24%, ini kabar baik untuk masyarakat bahwa mengalokasikan RAPBN 2024 dengan subsidi listrik Rp73,24 triliun.

Untuk volume LPG kalau bisa naik 8,5 Pak ya karena sekarang nelayan, petani, sektor UMKM itu juga menggunakan LPG, kecuali Bapak memberikan izin *lah* untuk Kabupaten Wajo yang sampai sekarang Bapak belum keluarkan izinnya untuk penggunaan CNG. Mudah-mudahan bisa sehingga bisa memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

Nah, Pak Menteri, izin Pimpinan mumpung di sini ada BPH Migas, ada Pertamina. Ini kasus Pertashop, sekarang ini Pertashop sudah mengalami kerugian, sampai menjual rumah, aset disita oleh bank karena selisih harga antara pertalite dengan pertamax itu besar sekali.

Nah ini juga harus karena Pertashop hanya dibolehkan menjual pertamax, bagaimana supaya ada solusi yang bisa dipikirkan untuk Pertashop-

Pertashop ini, ini ada BPH Migas, ada Pertamina agar, saya *nggak* tahu salah satu alternatif solusi apakah diperbolehkan dia menjual pertalite dan saya juga ingin menanyakan isu tentang subsidi untuk pertamax, apa benar atau tidak?

Tadi sudah dikatakan tidak benar Pak ya, tapi sudah, saya kemarin ditanya oleh, diwawancara oleh media. Saya katakan itu bukan solusi yang tepat karena pemakai pertamax itu *kan* untuk kelompok menengah ke atas, masa mereka diberikan subsidi, itu tidak tepat.

Hanya terkait dengan Pertashop ini, mungkin perlu Pak Menteri memfasilitasi pertemuan dengan BPH, dengan kementerian, dengan Pertamina, bagaimana mengatasi Pertashop ini kalau Bapak jalan Jawa saja ya belum di Indonesia Timur, itu rata-rata Pertashop sudah tutup, bukan solusi juga bahwa mereka dikasih dijadikan agen gas atau dijadikan agen untuk BRllink, tapi main bisnis mereka *kan* adalah keadilan energi, apalagi Pertashop itu *kan* di daerah-daerah yang agak jauh dari SPBU.

Nah ini harus dicari solusi Pak, ini sudah menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia, kami sudah didatangi Asosiasi Pertashop dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Indonesia Timur datang ke DPR ini mohon ini dicarikan solusinya.

Jadi kami dukung apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait ini, kami minta untuk gas, *lifting* minyak bumi menjadi 650 dan volume LPG menjadi 8,5.

Demikian.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terakhir Bu Roro, silakan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Bapak Menteri ESDM serta seluruh jajaran, Bapak Dirut PLN, Ibu Dirut Pertamina, BPH Migas, SKK Migas, Pak Kepala dan seluruhnya yang saya hormati.

Yang pertama tentunya kami ingin mengucapkan selamat seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya berkaitan mengenai pencapaian WTP ya, walau ada beberapa tadi temuan yang sudah di-*highlight* oleh teman-teman tidak perlu detail lagi kita bahas, mohon sekiranya dapat diatasi sesuai dengan prosedur.

Lalu kemudian yang kedua, berkaitan mengenai pagu anggaran ya, memang terkhusus untuk tahun anggaran 2024 kami menyadari bahwa tadi Bu Ratna juga sudah menyampaikan bahwa sektor energi ini berkontribusi cukup signifikan terhadap PDB nasional kita. *Nah* oleh karena itu dukungan politik anggaran itu patut untuk kita dorong agar apa namanya kontribusinya itu bisa betul-betul lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karena itu kami menggunakan politik *power* yang saat ini kita miliki untuk kemudian mendorong agar anggaran ini bisa kita tingkatkan dan nanti teman-teman di Banggar tentu akan bisa membantu menyelaraskan agar bisa tercapai target-target sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian ESDM.

Lalu kemudian yang ketiga berkaitan mengenai tren *lifting* migas ya, kalau dari segi asumsi makro mungkin sudah jelas tadi Fraksi Partai Golkar juga sudah bicara. Pada intinya adalah kami menyadari melihat bahwa tren *lifting* migas, terkhusus untuk minyak ini semakin menurun ya dengan berjalannya waktu. Sedangkan kita tahu bahwa target besar yang idealis yaitu adalah 1 juta barel per *day*. Kita melihat pertahun-tahun dari tahun 2022 dengan angka 612, 2023 after Juli ini 606,4 berarti kan kita mengalami penurunan walaupun APBN kita sudah menyiapkan untuk *lifting* sebesar 660 *thousand* barel per *day*.

Oleh karena itu saya berharap sekali walaupun capaian *lifting* secara keseluruhan kita sudah mencapai 92,2%, tapi saya mohon sekali kita lebih realistis dalam menge-*set* sebuah target *gitu*. Dengan harapan bahwa dengan berjalannya waktu kita bisa *reach* target tersebut dengan langkah-langkah yang konkrit *gitu*. *Nah* kalau misalnya memang setiap tahunnya kita mengalami masalah, itu masalahnya ada di mana, lalu kemudian eksis strategi ketika target itu tidak bisa tercapai seperti apa?

Nah ini *kan* juga perlu jelas *gitu* ya agar kita juga bisa memetakan dari segi anggaran, dari segi *lifting*, dari segi target *lifting* ini *kan* juga sangat amat menentukan. Kalau misalnya sektor ini tidak mumpuni dan tidak bisa menyediakan energi sesuai dengan harapan, bagaimana dengan lini sumber energi-energi lainnya yang patut untuk kita dorong. *Nah* inikan kebijakan juga harus dapat mendukung sesuai dengan kemampuan sebuah negara.

Dan yang ketiga, saya ingin mohon penjelasannya mungkin berkaitan mengenai subsidi BBM ya, pengalihan subsidi dari pertalite ke pertamax. Apakah betul pertalite ini dihilangkan? Ini saya sekalian menyampaikan karena sempat menjadi pertanyaan di daerah, di dapil *gitu* ya karena pada dasarnya kita mendukung langkah agar BBM yang dengan oktan yang tinggi ini dapat mengurangi polusi udara yang merupakan sebuah fenomena dan kenyataan

bisa dibilang ya, yang saat ini kita hadapi. *Nah* maka perlu kita pertimbangkan juga sebetulnya dari segi daya, daya beli masyarakat.

Yang terakhir kembali lagi ke isu berkaitan mengenai polusi udara, saya mohon penjelasan dari Kementerian ESDM terkait langkah apa saja yang merupakan prioritas untuk kemudian kita mengatasi permasalahan ini. Kita bisa melihat bahwa bahkan sebagian dari kita sudah mulai pakai masker lagi *gitu kan*, ini *kan* sesuatu hal yang tidak bisa terlihat tapi sangat amat mempengaruhi kesehatan manusia.

Oleh karena itu kembali lagi kepada politik anggaran, dimana kita yang saat ini diberi amanah harus merumuskan secara kolektif bagaimana kemudian kita bisa menggunakan kewenangan yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat dan masa depan masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa lagi semata-mata kita memikirkan hari ini, tapi kita memikirkan bagaimana 20-50 tahun ke depan.

Kalau Bangsa Indonesia dan masyarakatnya tidak disejahterakan, mereka tidak produktif dalam membangun bangsa bagaimana kita kemudian bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045, itu sesuatu hal yang tidak mungkin menurut saya.

Dan Pak Menteri, Bapak diberi amanah saya yakin bahwa Bapak bisa betul-betul mencari solusi yang terbaik agar sektor energi yang pada prinsipnya berkontribusi cukup tinggi terhadap polusi udara ataupun, mohon maaf bukan solusi tetapi emisi karbon secara keseluruhan mempunyai peran yang andil dengan harapan bahwa nanti sektor-sektor lainnya juga berupaya agar bisa, kita bisa mengatasi isu ini bersama.

Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Nasir masih nelpon, kami persilakan Bu Diah ya, Pak Nasir terakhir ya.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran.



Sedikit saja tambahan catatan Pak, saya tergelitik dalam dua hal. Yang pertama tentang realisasi PNBPN, di sini memang sebuah prestasi Pak bahwa 5 tahun terakhir capaian PNBPN selalu di atas target, bahkan ada di atas targetnya sampai 423%. Tapi saya cuma tergelitik bahwa sebutan di atas target itu karena prestasi atau karena pasang targetnya terlalu rendah? Karena begini Pak, pajak yang berasal dari rakyat saja itu senantiasa di target peningkatan pendapatan dari rakyat itu luar biasa.

Nah sementara ini yang sifatnya PNBPN ini kalau kita melihat dari *track record* sebetulnya, sebelumnya seharusnya *kan* penetapan targetnya itu bisa lebih besar *gitu*. Jadi saya hanya ingin bahwa nanti di dalam penetapan 2024 jangan sampai kita berbangga diri kepada realisasi yang sangat di atas target karena justru karena terlalu rendahnya target yang ditetapkan. Ini bisa salah hitung atau cari aman supaya dampaknya terlihat bahwa realisasi tercapai.

Yang kedua, terkait dengan catatan-catatan dari LHP BPK yang sedemikian rupa tadi disampaikan oleh Bu Ratna juga *potential loss gitu ya*. Saya melihat begini Pak, kerugian negara itu kalau korupsi tidak hanya pada masalah belanja, tetapi ketika kita juga kehilangan pendapatan dalam urusan-urusan ini, ini bisa juga jadi masuk kategori korupsi kalau menurut saya *gitu*. Jadi korupsi itu tidak hanya pada pengeluaran, pada sisi pendapatan itu ketika ada potensial yang harusnya pendapatan itu masuk ke negara yang kemudian tidak bisa direalisasikan.

Jadi kami tetap berharap bahwa apa yang menjadi catatan-catatan itu betul-betul bisa sangat serius ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi kerugian negara di sektor hilangnya potensi pendapatan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, Pak Nasir kalau, Pak Nasir, kalau ini masih ada satu agenda lagi soalnya, sekarang atau yang agenda berikutnya.

Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Baik, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,
Teman-teman Anggota Komisi VII.

Kami cuman mau menyampaikan kepada Pak Menteri tentang regulasi pemasukan negara, yang mana kita melihat pemasukan negara baik dari minyak maupun hasil bumi yaitu batubara, nikel, bauksit. *Nah* saya mungkin



tadi sudah WA ke Pak Menteri, tapi supaya lebih jelas Pak Menteri ini seperti apa *sih* regulasi yang ada di Kementerian ini.

Nah saya mendapat kabar sekarang Indonesia malah mengimpor nikel, *nah* saya minta mungkin *kok* jadi kita yang impor, padahal kita disampaikan di mana-mana bahwa penghasil nikel terbesar ini nomor satu di dunia itu Indonesia. Ini malah sebaliknya, hari ini kita mengimpor.

Saya ingin jawabannya mungkin mungkin kalau diizinkan juga interaktif dari Pimpinan, kendalanya seperti apa yang terjadi di birokrasi di bawah kepemimpinan Saudara Menteri, kenapa sampai terjadi kita mengimpor nikel ini padahal konsesi kita cukup besar, perusahaan banyak. *Nah* malah saya dapat masukan perusahaan-perusahaan yang *nggak* kredibel malah RKB-nya dikeluarkan, perusahaan-perusahaan yang punya kualitas dan punya kemampuan sampai hari ini dipersulit di birokrasi Pak Menteri.

Nah apakah ini yang menjadi kendala di Kementerian ESDM ini dan mungkin kejadian yang di, yang terjadi kepada kementerian yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ini sebetulnya cambuk pedas yang cukup berat menurut saya yang menjadi kacamata Kementerian. Apakah birokrasi ini masih tetap seperti ini dan malah terjadi kekacauan administrasi, ini yang menjadi kendala atau memang cadangan kita yang tidak ada.

Mohon nanti izin Pimpinan, mungkin bisa dijawab interaktif supaya permasalahan ini jelas Pak Menteri, mungkin izin Pak Menteri.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Menteri, ditanggapi sedikit.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Pak Nasir.

Jadi memang kita sudah telusuri berita-berita di media tersebut dan terindikasi bahwa perusahaan yang mengimpor itu adalah perusahaan yang selama ini mengambil bahan baku dari Mandiodo. Yang mana Mandiodo ini sekarang sedang bermasalah, jadi karena mereka harus berproses dan terkait dengan kontrak, dengan *off taker* di *downstream*-nya mereka mengambil langkah ini karena untuk, karena memang secara keseluruhan karena tidak boleh ekspor nikel OR ini, semua produsen tambang itu sudah terikat dengan **...(suara tidak jelas 58.17)...** *smelter* yang sedang berjalan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Maksud saya gini, izin Pimpinan.

Yang jadi masalah ini Pak menurut kalangan penambang, maupun pengusaha tambang ini lokasi tambang nikel kita ini cukup besar. *Nah* tapi

terhambatnya birokrasi yang termasuk evaluator yang tertangkap kemarin di Kejaksaan Agung itu juga salah satu yang mempersulit birokrasi pemerintahan di Kementerian ESDM ini. *Nah* apakah ini penyebab terhambatnya perizinan RKB yang ada di kementerian ini *gitu loh*.

Maksud saya kita harus membuka Pak Menteri, *nah* ini *kan* tambangnya Antam ini aja ini 16.000 ini *nggak* tersentuh sampai hari ini *gitu*, apalagi tambang-tambang yang lain *gitu*. *Nah* permasalahannya ini keterlambatan birokrasi administrasi yang ada di kementerian, saya minta ini apa *sih* titik permasalahannya *gitu*. Apakah kurang pegawainya atau kurang sistemnya ataukah ada yang *njelimet* di sana *gitu*, *nah* tolong ini jangan menjadi hambatan. *Nah* ini kalau nawacita-nya Bapak Presiden Jokowi ini *kan* jadi tunjangan pemasukan negara yang sangat besar.

Jadi saya minta ini harus *clear* Pak nanti Bapak jawab, apa *sih* permasalahannya kalau dari sini, ini *kan* udah terjadi kemarin ditangani oleh Kejaksaan Agung. *Nah* saya minta ini *clear* administrasinya atau apanya, menurut masukan dari teman-teman cukup banyak dokumen yang mangkrak di sana yang tidak dikeluarkan oleh kementerian, malah perusahaan-perusahaan yang USS, Laman Mining ini, ini perusahaan yang *nggak* punya kapasitas bisa cepat mendapatkan izin RKB *gitu loh*. Saya minta perusahaan siapa ini *gitu*, apa *sih* kelebihan perusahaan-perusahaan, malah perusahaan-perusahaan yang punya *smelter*, yang punya kemampuan ini *nggak* keluar, kendalanya ada apa *gitu*.

Nah itu mungkin Pimpinan, nanti saya minta jawabannya dari Pak Menteri harus *clear gitu*, supaya ini ada pijakan apakah nanti mungkin *start*-nya Irjen ini tahu di sana, satu persatu di cek *list*, *nah* biar *clear gitu loh*, biar cepet Pak. Ini *kan* pemasukan negara, jangan ditunda lagi *gitu*. Bahkan tadi sudah banyak temuan BPK yang diminta penyetoran uangnya, tapi kalau birokrasinya seperti ini kita ribet *gitu*.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, baik, udah bisa ditangkap ya Pak Menteri ya, jadi intinya Pak Nasir ini ingin mendorong percepatan dalam proses penerbitan RKB. Memang kita sadari bahwa saat ini di Minerba lagi menata Kembali pasca terjadi kemarin kan, betul *gitu* ya Pak Menteri ya dan untuk itu.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Makanya ini mungkin udah 5 tahun Pak, ditata macam mana lagi ini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mungkin kita agendakan ke depan, khusus RDP terkait tata kelola birokrasi di Kementerian ESDM karena saat ini agendanya kita terkait, kembali ke agenda, agenda penetapan APBN, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Makanya gini Pak Ketua, ini *kan* yang kita bahas tentang pemasukan negara supaya pemasukan negara ini jelas, ini *kan* terhambat sekarang gara-gara birokrasinya. *Nah* kita minta penuntasan birokrasi ini harus jelas *gitu*.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak Menteri, kasih tanggapan sedikit, Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik, jadi dari mulai dari basisnya sejak Undang-undang 3/2020 kita sahkan seluruh perijinan yang dari daerah masuk ke pusat. *Nah* dulunya minerba itu hanya mengurus perizinan kurang lebih 400 izin, *nah* sekarang sudah bertambah 6.000 lagi. *Nah* itu adalah tambahan *load* yang memang direspons sebaik mungkin, selain itu ada juga ya persyaratan-persyaratan yang dulu diterapkan, itu persyaratan itu *list*-nya itu ada 27, 27 isian untuk 1 aplikasi dan ini kalau dikali 6.000 dibagi dengan *mainpower* yang ada *kan* ada. *Nah* itu memang dilakukan proses simplifikasi ya, yang 27 itu kita sudah kita pilah menjadi 5 dan itu dikuatkan dengan Permen yang kemarin sudah di issue.

Nah kalau terkait dengan kasus yang terjadi adalah kebijakan untuk bisa mempercepat proses perizinan itu, *nah* inilah antara lain juga yang juga mendorong produktivitas di sektor mineral, sehingga bisa selain *booming* dari *commodity price*, *nah* juga ada peningkatan dari volume. Ini banyak *dispute* yang terjadi, perusahaan yang *nggak* ngerti isi *form*, terpaksa harus kembali diulang lagi dan saya sudah, kita sudah perintahkan ya seluruh staf untuk bisa merespon setiap yang belum memenuhi untuk segera *immediate* diberikan informasi.

Kemudian RKAB, RKAB yang tadinya tiap tahun untuk produksi, sekarang kita berikan 3 tahun. Jadi ini adalah langkah-langkah, selain itu juga IT kita, IT kita ini *nggak* memadai selama ini. *Nah* sekarang ini kita udah menggunakan konsultan dari IBM untuk bisa menyempurnakan ini dan mudah-mudahan di awal tahun depan ini sistem ini sudah jalan, nanti Pak Nasir silakan untuk jalan-jalan datang ke kantor untuk lihat-lihat.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, tolong diperkenalkan Inspektur Jenderal yang baru, beliau Letnan Jenderal bekas Kasum ABRI, bekas Irjen TNI, bekas pangkogab atau dulu namanya pangkogabwilhan tolong diperkenalkan karena itu di tempat Pak Jokowi tentunya ada maunya itu supaya lebih mantap sistemnya *gitu*. Tolong diperkenalkan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Saya pikir mungkin Pak Ramson udah kenal dulu, jadi saya kenalkan Bapak Letnan Jenderal Gunawan Bambang Susantono. Beliau join sebagai Inspektur Jenderal di bulan lalu di Kementerian ESDM atas penunjukan dari Bapak Presiden, beliau dulu mantan Paspampres, mantan Dankormar, kemudian yang terakhir jabatannya adalah Irjen TNI dan kami sudah koordinasi di mana Irjen ini akan melakukan langkah-langkah pengawasan yang lebih, lebih, lebih intens ya untuk bisa, bisa mencegah kejadian-kejadian yang potensi bisa terjadi.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, Pak Menteri kemarin sebelumnya ya Pak Letjen. Ini Pak Letjen ini sama namanya Pak Bambang ya *kan* Letjen Bambang, cuma beliau ini Letjen menjabat jadi Irjen, ini turun pangkat malah ini, bintang 3 ke Irjen, Irjen itu kalau di polisi bintang 2.

Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan ke Bapak dari meja pimpinan perwakilan dari.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pimpinan, Pimpinan dari PDI Perjuangan, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pimpinan, saya belum selesai.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Nasir masih ada satu sesi lagi, habis itu silakan didalami di.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Maksud saya biar saya tutup bahasannya Pak Menteri.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, silakan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Baik, terima kasih, jadi begini Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mungkin beliau *nggak* selesai *nggak* puas ini. Kita ini soalnya masih ada agenda dengan Kementerian Perindustrian.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan, anda ini *kan* ditunjuk sebagai menteri untuk bagaimana negara ini maju, bukan anda jadi mainkan wayang ini di sini *gitu*.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Saya itu bukan wayang, saya minta perhatian itu saya manusia.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Anda itu punya target di sini, negara ini mengejar mengejar devisa pemasukan negara. Jadi saya minta tanggal kapan ini bisa dimulai proses ini supaya cepat, itu yang ingin saya jawabannya, bukan sekarang kalau memang, kalau memang tenaga di kementerian.

Jadi kalau tenaga di kementerian ini masih kurang, ditambah, kalau anggarannya masih kurang untuk menambah sistem IT-nya ditambah. Urusan paspor di negara ini Pak, jutaan orang diurus tapi selesai dengan hitungan jam *gitu*, bukan di kementerian seperti ini. Kementerian ini harusnya.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Kami sudah ada program.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Anda diam dulu, saya masih bicara.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Anda dengar dulu.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Nasir, saya pikir karena ini.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya masih menyelesaikan Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Nasir, saya yang mengatur jalannya persidangan kalau *nggak* saya tutup *kan*. Jadi saya pikir kita bergantian, tolong Pak Menteri juga hargai kita, tolong Pak Nasir juga begitu. Kita minta Pak Nasir *to the point*, pokoknya mana yang terkait.

Silakan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya minta Kementerian kasih jadwal penyelesaian terkendalanya ini, jangan bicara ini birokrasi sudah 5 tahun terhambat. Saya minta ada tanggal penyelesaiannya kapan, paspor itu jutaan orang yang mengurus, tapi setiap hari, setiap menit selesai, datanya mungkin mungkin juga sama.

Pak ini birokrasi sudah canggih, tim IT-nya banyak, bisa digunakan seluruhnya, bukan dibuat ribet *gitu*. Ini pemasukan negara yang paling besar, makanya kita dorong dan ini ada masanya Pak, ada masanya, ada waktunya, itu yang kami berikan masukan *gitu*.

Izin Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, Pak Menteri intinya Pak Nasir tadi sudah.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Februari 2024, kemarin kita sudah bicara dengan IBM, target, termasuk arsitektur keseluruhan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

2024 ya Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Februari.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, baik ya Pak Menteri sudah menyanggupi Februari 2024 sistem akan berjalan dengan baik. Kalau bisa pas 1 hari setelah Pemilu, menterinya udah diganti nanti.

Silakan Pak Maman, *oh* Pak Willy mohon maaf Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan untuk saya mewakili PDI Perjuangan.

Yang kami hormati Bapak Menteri dan seluruh undangan yang hadir menyertai Pak Menteri.

Saya langsung saja permasalahan yang saya ingin sampaikan, terlepas dari agenda rapat kita, terutama aspirasi yang kami terima selama reses, antara lain menyangkut masalah, tadi kita membincangi tentang pendapatan ya. Kalau tema saya sedikit, bukan pendapatan dan saya terima kasih karena Pak Irjen, selamat datang dulu Pak Irjen. Saya senang sekali karena Pak Irjen ini semangat baru ya karena orang baru, ya tentu juga menjadi perhatian apa yang ingin saya sampaikan ini.

Pertama, saya berbicara tentang *lost* kehilangan pendapatan negara, kalau tadi kita berbicara tentang pendapatan tetapi saya melihat bahwa negara ini tidak terlalu peduli dengan apa yang seharusnya negara terima, *nah* sehingga ini menjadi *lost*. Yang pertama menyangkut masalah ilegal, ilegal *mining* ini sangat jelas ya terbuka, nampak ya, pelaku-pelakunya juga ada tertangkap, aturan main juga ada, tetapi saya lihat negara tidak berdaya *gitu* karena ini banyak sekali yang kita kehilangan ya peluang, pendapatan dari pajak atau retribusi, kemudian juga kita merusak lingkungan ya kalau kita melakukan revitalisasi tentu juga ini mahal, kemudian juga akibat dari ilegal ini juga kalau kita mau hitung ya mungkin lebih banyak lagi *gitu*.

Nah maka untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya katakan karena kita semua hadir banyak dari anggota banyak hadir, pimpinan hadir dan juga Pak Menteri didampingi semua pejabat-pejabatnya. Saya ingin memberikan masukan Pak Menteri yang melalui Pak Dirjen nantinya, kalau kita melihat bahwa luasnya kerusakan lahan dan bertambahnya ilegal.

Saya berbicara kalau ilegal itu ada 2, satu ilegal yang memang perusahaan ada izinnya ya tapi mereka ada ilegalnya, kemudian masyarakat atau orang tertentu melakukan kegiatan yang ilegal, ya tentu ini sangat

merugikan. Bagaimana solusinya? Karena sampai saat ini saya melihat pembiaran ini terus berlanjut, berlangsung.

Maka untuk itu mungkin dengan adanya Irjen yang baru ini mungkin beliau mungkin punya PR yang paling pertama mungkin menurut saya karena hari ini kita baru jumpa ya mungkin membantu Pak Menteri dan juga teman-teman yang lain ya.

Kalau kita melihat beberapa waktu lalu juga ada penertiban yang dilakukan oleh penegak hukum dan itu kita dukung dan ternyata juga tidak ada solusi, tidak ada solusi yang dilakukan oleh negara *gitu* karena bagaimanapun yang ilegal ini *kan* masyarakat dan rakyat kita juga, *nggak* mungkin kita basmi atau kita kurung karena jumlah mereka ratusan, mungkin saya katakan bisa ratusan ribu orang yang melakukan ini kalau kita mau jujur *gitu*.

Nah maka untuk itu saya berpendapat begini Pak Menteri, coba kita duduk bersama dengan pemerintah kabupaten kota atau provinsi untuk membincangi tentang tata ruang. Tentang tata ruang yang akan kita siapkan untuk wilayah pertambangan rakyat karena saya melihat ini yang pertambangan rakyat yang saya soroti ini agar mereka betul-betul bisa diatur, kemudian dikelola oleh negara, sehingga juga tidak *lost* ya, kerusakan tidak *lost* atau berpendapatan.

Ya tentu negara juga harus mengeluarkan dana dalam hal ini, terutama apabila kita menyiapkan areal khusus untuk kawasan tambang rakyat ini, wilayah pertambangan rakyat ini tentu harapannya negara juga harus turun tangan untuk melakukan survei, untuk melihat potensi di mana nanti area tambang rakyat ini betul-betul ada isinya, ada potensinya, ada potensi ekonominya.

Kalau tidak ini tidak akan bisa, saya melihat WPR-WPR yang dikasihkan itu sebentar saja mereka sudah lari karena apa? Karena tidak ada potensi, mereka kembali lagi menjarah di tempat-tempat yang mereka sukai *gitu* dan ini terjadi kerusakan.

Maka oleh karena itu saya usul supaya negara tahun 2024 ini sudah harus menyiapkan anggaran, anggaran yang mengarah untuk kita menyelamatkan lingkungan kita, kerusakan lingkungan, kemudian menyelamatkan juga pendapatan yang *lost* juga karena kegiatan ini dan tentu efek lain yang luar biasa juga adalah masalah hukum yang mereka juga hanya karena perut, urusan makan yang untuk 1 hari terus mereka juga mendapat tekanan karena memang pelanggaran hukum yang dilakukan dan ini kami berharap melalui Kementerian Pertambangan dan yang terkait untuk segera, menurut saya membahas ini agar ini tidak terjadi terus-menerus Pak Menteri.

Ini kalau dilakukan pembiaran saya pikir nanti kita kehabisan wilayah, wilayah-wilayah potensi yang rusak oleh petambang-petambang yang ilegal. Kalau pertambangan-pertambangan yang sudah ada izin juga cukup banyak, tapi saya tidak ungkapkan di sini karena menurut saya itu beda perlakuannya karena saya ingin sekali agar rakyat itu diperlakukan dengan baik dan mereka

punya kesempatan untuk berusaha dan mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak juga, mungkin seperti itu harapan saya.

Kemudian tentu juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Dirjen Listrik dan juga kepada Dirut PLN ya karena hampir 2-3 tahun saya bicara tentang listrik desa yang ada di dapil saya, Kalimantan Tengah.

Yang mana sedikit gambaran Pak Menteri, ini ada perkembangan tetapi saya melihat waktu saya tahun 2024 nanti *kan* berakhir. Saya melihat tidak akan bisa gini *nih* Pak Menteri, kalau tidak dilakukan percepatan yang di luar biasa Pak Menteri, artinya anggaran, kemudian juga SDM dan lain-lain yang menunjang.

Gambarannya Pak Menteri Kalteng itu ada 13 kabupaten, 1 kota ada 36 kecamatan, 16 ibu kota kecamatan ini belum masuk PLN Pak Menteri. Jadi ibukota kecamatan itu dari 136 itu ada 16-nya belum masuk PLN, itu gambaran. Kemudian 1.571 desa kelurahannya dari jumlah itu, dari jumlah 1.571 desa kelurahan itu kurang lebih 450 desa juga PLN katalis desanya belum masuk *gitu* Pak Menteri ya.

Saya senang juga karena 2023 ya, 2024 katanya ini ada lagi penambahan-penambahan, terutama 2023 tahun ini ada 125 desa yang akan dilistrikan, ini luar biasa, saya senang sekali ya mendapat berita ini dan memang kenyataan juga di lapangan sedang dilakukan.

Nah hanya saya tidak tahu jumlah anggaran yang saya dapat informasi kurang lebih 500 miliar, sekitar 500 miliar untuk melistrikan 125 desa itu. *Nah* di 2024 *nah* masa berakhirnya tugas saya sama Mukhtarudin, sama Iwan Kurniawan karena kami ada 3 orang Pak Menteri, Anggota DPR dari dapil ini kayaknya kami *nggak* mampu mengurus listrik ini Pak Menteri ya. Maka oleh karena itu saya senang sekali Pak Menteri hadir, dirjen hadir, kemudian juga Dirut PLN hadir supaya ini harus didengarkan semua oleh rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat Kalimantan Tengah.

Berita yang kami sampai ke kami penyertaan modal negara yang PMN ini untuk PLN untuk melistrikan Kalteng tahun depan. Katanya tahun depan itu 165 desa lagi akan masuk listrik, wah ini keren Pak Menteri ya dan tentu katanya asal tidak dirubah-rubah anggarannya itu ya atau tidak di apa namanya, di ya mungkin dipakai ke sana ke sini ya kalau memang terarah *nih* terima kasih banget karena kurang lebih 1,1 triliun ini anggaran untuk 165 desa.

Kalau ini pun selesai Pak Menteri masih ada kurang lebih 200 desa lagi Pak Menteri, *nah* masa tugas tami bertiga di Dapil Kalimantan Tengah ini habis ya. *Nah* kira-kira gimana Pak Menteri, Pak Dirjen dan juga kepada Dirut PLN yang hadir pada saat ini. Ini menjadi apa namanya harapan kami agar segala sesuatunya ini bisa segera diselesaikan, luar biasa Pak Menteri kalau tidak ada listrik itu rumusnya adalah tidak ada kebahagiaan. Jadi sudah pasti Pak Menteri, kalau tidak ada listrik tidak ada kebahagiaan.

Nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ini terakhir. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Andi tadi tentang segeranya Pertamina melakukan evaluasi terhadap Pertashop dan waktu itu kita sudah menerima asosiasi dan saya pikir apa yang disampaikan tadi betul terjadi juga di Kalimantan Tengah. Harapan kami agar Pertashop ini menjadi urgent untuk segera dilakukan evaluasi, mungkin itu dari saya.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Menteri dan seluruh jajarannya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Merdeka.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Willy.

Tapi saya sedikit agak trenyuh Pak Willy menyampaikan menghabiskan batas akhir masa jabatan ini, kita berharap Pak Willy terpilih kembali, jangan batas akhir Pak Willy, belum berakhir dan juga untuk diketahui Pak Willy bahwa program listrik itu ada dua. Kita harus pisahkan yang bersumber APBN, pemasangan listrik gratis itu program dari Kementerian ESDM. Memang yang memasang itu PLN, kalau yang PLN sendiri kita belum pernah dilibatkan *sih* sama Pak Darmo. Jadi itu yang pasang listrik itu Kementerian ESDM yang membiayai.

Baik, terakhir Pak Maman ya soalnya kita mau ambil kesimpulan untuk 2 agenda, berikutnya masih agenda yang berikutnya Pak Menteri.

Silakan Pak Maman.

F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam Sejahtera,
Salam hormat Pak Menteri beserta dengan jajaran, *wabil* khusus buat pendatang baru Pak Irjen salam kenal Pak, *welcome to the club* Pak.

Ya sekedar informasi aja Pak, Komisi VII beda sekali Pak dengan TNI Pak. Ini kayak Sun Go Kong, liar, nakal, brutal, tak pernah berhenti bertindak sesuka hati.

Terima kasih banyak, jadi ya mohon dimaklumi Pak kalau agak *zig-zagnya* begitu ya.



Mohon izin Pimpinan, saya akan *stretching* terhadap agenda di poin pertama saya. Namun setelah itu saya ada sedikit, kasih sedikit pandangan di luar agenda. Saya mau bicara mengenai isu solar subsidi Pak, itu *kan* kalau di 2024 nota keuangan kita itu minyak solar itu 19 juta kiloliter Pak kita ketok, termasuk yang minyak tanah itu 0,58 kiloliter 0,58 juta kiloliter.

Namun memang di beberapa lapangan Pak, di beberapa daerah kita banyak sekali dapat masukan dan saran, ini terkait yang 2023-nya Pak. 2023 itu kita putuskan itu untuk solar itu 17,6 juta kilo liter.

Nah menurut pandangan saya ini perlu ada sedikit ditambahkan mendekati sesuai dengan yang 2024, artinya apa? Saya belum tahu mekanisme ruangnya bagaimana, apakah bisa ditambahkan 17,6 itu menjadi mendekati sesuai dengan yang kita prediksi di yang sudah kita tetapkan di 2024.

Poinnya apa yang ingin saya bilang bahwa melihat konteks kebutuhan di lapangan terkait solar subsidi ini, saya melihat ESDM bersama-sama dengan BPH Migas perlu mengkaji kembali untuk 2023 dibuka ruang untuk ditambahkan solar subsidi Pak mendekati sampai kurang lebih 18 juta kilo liter. Hal ini karena memang kondisi riil di lapangan beberapa daerah cukup membutuhkan terkait suplai solar subsidi ini, itu yang ingin saya, penekanan saya, Pak.

Nah lalu yang kedua terkait RUU Migas, *alhamdulillah* nanti jam 2 saya akan merasakan, eh jam 3 saya akan merasakan menjadi pesakitan seperti Bapak di sidang oleh teman-teman di Baleg, Pak. Jadi makanya sekarang sejak saya dipanggil di Baleg Pak, saya agak baik sama mitra Pak sekarang, saya udah *nggak* pernah lagi keras-keras karena ternyata saya merasakan posisi jadi mitra itu agak berat, Pak.

Jadi nanti jam 3 *insya* Allah itu akan rapat sinkronisasi terakhir terkait RUU Migas dan akan dikembalikan di Komisi VII dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah babak awal dari proses percepatan upaya kita untuk menaikkan *lifting* migas sesuai dengan harapan yang diketok oleh pemerintah 1 juta barel per hari.

Artinya saya sampaikan ini saya mohon sekali dukungan nanti paska dari Baleg intensitas komunikasi politik antara pemerintah dengan Komisi VII agar sudah mulai kita intensifkan di luar dari proses formal yang sudah berjalan karena ada harapan dari teman-teman Komisi VII ini adalah menjadi RUU inisiatif DPR yang ingin kita *speed up* sebelum masa berakhir masa sidang kita nanti di Oktober 2024 mau segera kita tuntaskan.

Jadi dalam forum ini saya minta betul-betul *support* kerjasama komunikasi politik kita terkait mengenai RUU Migas ini Pak Menteri, itu kurang lebih sesuai dengan agenda. Saya mau izin di luar agenda Pak Pimpinan yaitu terkait mengenai yang pertama insentif motor listrik, ini memang saya meyakini ini di wilayah Kementerian Perindustrian. Namun menurut saya perlu saya sampaikan di dalam forum ini bersama-sama dengan pemerintah agar ada



kesamaan frekuensi kita terhadap narasi besar insentif motor listrik, kenapa? Yang beredar opini di publik Pak, ini seakan-akan disebut subsidi motor listrik.

Saya ingin sampaikan pada saat pemerintah menetapkan ini sebagai subsidi motor listrik, pemerintah akan masuk kepada sebuah kesalahan yang sangat besar karena harus dipahami insentif ataupun subsidi yang disebutkan oleh pemerintah itu spiritnya bukan ingin membantu orang miskin, luar biasa ini, maklum Pak mau pen-caleg-an, *nggak* bercanda, Pak. Saya, maklum Pak, baru habis berkabung jadi kita sebagai anak harus banyak-banyak berdoa Pak, minimal itu aja yang bisa kita berikan pengabdian terakhir kita kepada orang tua.

Jadi Pak begini, terkait insentif motor listrik kalau kita masuk kepada diksi subsidi Pak, ini kesalahan karena hampir praktis pengguna motor itu, pengguna kendaraan itu bukan orang tidak mampu tapi orang mampu. Makanya pada saat dibuat narasinya subsidi motor listrik, akhirnya kita menetapkan ada beberapa kriteria-kriteria orang yang berhak menerima sampai hari ini tidak bisa berjalan, karena memang pada saat itu dimasukkan dalam kategori misalnya orang yang punya listrik berapa watt, ataupun rekening sekian, ataupun tidak mampu dan lain sebagainya pasti dia *nggak* akan pernah punya kemampuan itu.

Poinnya yang ingin saya bilang kepada pemerintah apa? Pemerintah harus berani mengatakan kepada publik bahwa program insentif, ataupun eh subsidi motor listrik ini bukan program subsidi. Ini adalah sebuah program yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk merubah *behavior* masyarakat kita, dari yang awalnya mengkonsumsi fosil *fuel* menjadi *renewable energy*, poinnya di situ, Pak. Jadi kalau kita sudah sepakat tadi merubah diksi subsidi itu menjadi insentif, siapapun berhak, jadi tidak usah lagi dikategorikan sebagai orang miskin.

Artinya siapapun berhak mendapat insentif motor listrik karena memang semangatnya adalah untuk menggeser behavior perilaku masyarakat Indonesia dari fosil, penggunaan fosil *fuel* ke penggunaan *renewable energy*, poinnya itu Pak yang ingin saya sampaikan. Ini hanya sekedar menyamakan frekuensi supaya jangan sampai kebijakan yang bagus ini akhirnya mandek hanya gara-gara terjebak pada narasi subsidi dan akhirnya kita dihajar dengan publik, oleh publik, karena sejatinya ini bukan subsidi, ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah, itu yang pertama.

Lalu yang kedua yang terakhir, terkait di luar agenda yaitu mengenai HBA (Harga Batubara Acuan). Begini Pak, saya memulainya dari satu pendekatan kita setuju dan sepakat bahwa ada upaya besar yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, secara prinsip kita sama, setuju. Namun pada saat upaya-upaya kita untuk mendorong peningkatan pendapatan negara itu dilihat ataupun terkesan jadi seakan-akan pemerintah mensiasati atau dalam tanda kutip ya "mensiasati" aturan hanya sekedar dalam rangka untuk mendorong peningkatan negara, ini bisa menimbulkan ketidakpastian investasi, Pak.



Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, terkait misalnya pengguna, penetapan royalti perusahaan-perusahaan yang dulunya PKP2B menjadi IUPK. Sekarang rata semua dikenakan 28%, sepengalaman kita penetapan royalti 28% berdasarkan HBA harganya. *Nah* namun hari ini pemerintah menetapkan langsung dikunci di 28%, ini yang menurut saya harus ada solusi, jalan tengah yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap beberapa perusahaan ini. Kenapa saya bilang seperti itu?

Begini Pak, kalau niat kita mau meningkatkan pendapatan negara persentase royalti memang dinaikkan, tapi kalau produksi menjadi turun sama aja bohong. Artinya apa? Yang harus kita dilakukan adalah bukan ingin meningkatkan atau menurunkan, tapi melakukan optimalisasi pendapatan negara.

Kalau saya jadi pemerintah Pak, terkait mengenai isu narasi HBA ataupun menurut HBA ini Pak, saya lebih mendorong begini. Didorong disesuaikan dengan HBA, misalnya kalau yang HBA-nya 70 dolar ataupun yang di atas 100 dolar, persentasenya sekian, sekian, sekian, tapi tekan kepada perusahaan itu untuk naikkan produksi, *gitu loh* Pak.

Artinya ini solusi yang *win-win solution*, misalnya yang tadi kita kunci di 28% tapi apabila HBA-nya harga 70 dolar, kalau berdasarkan Kepmen apa, PP Pak, PP yang tapi saya lupa nomornya, nomor 20 berapa, itu *kan* ada pembagian HBA-nya Pak, harga-harganya. Misalnya 14%, *oke* kita setuju sesuaikan dengan itu tapi kunci, produksi *lo* misalnya sekarang jadi 1 juta barel, *eh* juta metrik ton per tahun, saya minta *lo gue* kasih itu tapi *loe* naikin jadi 3 juta.

Artinya apa? Kita mendapatkan 2 pemanfaatan Pak, pemanfaatan *reserve* batubara kita yang cukup besar. Lalu yang kedua, peningkatan produksi dan penyerapan optimalisasi *reserve* di setiap lapangan itu. Jadi kurang lebih begitu Pak yang ingin saya bilang, saya sampaikan ke Bapak karena begini kalau ini tidak segera dicari jalan tengah saya melihat akan ada upaya untuk menurunkan produksinya mereka.

Kita harus lihat Pak, kita harus paham bahwa ini sudah momentum politik, pemerintahan hari ini kurang lebih akan waktunya tinggal kurang lebih 1 tahun. Artinya mereka kalau melihat potensi-potensi politik seperti ini, mereka daripada mereka genjot produksi naikin, ya mendingan *gue* tahan produksi tapi *gue* tunggu ganti rezim dengan harapan ada peluang.

Ini yang harus dijaga oleh pemerintah, jangan sampai semangat kita untuk mendorong peningkatan negara dan profesionalisme, serta kepastian investasi di industri pertambangan akhirnya terganggu hanya sekedar gara-gara urusan yang sepele ini sebetulnya, kurang lebih begitu Pak.

Jadi ini tadi poin yang terakhir, saya hanya sekedar ingin mem-*brainstorming* aja supaya semangat kita untuk mendapatkan optimalisasi pendapatan negara di sektor pertambangan ini menjadi optimal. Saya pikir itu aja Pak, ini dari saya.

Terima kasih banyak Pimpinan, atas kesempatan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi Pak Menteri setelah sekian banyak tadi masukan, bahkan nasehat dari Ustad Nasir untuk Pak Menteri, Pak Nasir ke mana. Jadi kita langsung kembali ke agenda utama kita karena tinggal satu agenda yaitu pengantar RKAK/L tahun 2024 dan menyikapi, dan saya rangkum dari narasi teman-teman Anggota Komisi VII terhadap apa yang telah dipaparkan Pak Menteri tadi.

Mungkin Pak Menteri *entar* jawab secara tertulis saja, saya pikir Pak Menteri ini tapi intinya kita ambil kesimpulan terkait poin pertama yaitu pembahasan LKPP APBN tahun 2024 tentang pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Dan melihat dari semua pertanyaan dan juga masukan, serta *support* dari teman-teman tadi, kami mengambil keputusan bahwa dan dari meja pimpinan, saya ambil kesimpulan bahwa LKPP APBN Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM sudah cukup bagus dan patut kita apresiasi, dan juga kita mendorong bahwa Menteri ESDM untuk juga menindaklanjuti secara nyata rekomendasi BPK atas beberapa temuan yang sudah ada.

Kita berharap tindak lanjut dari rekomendasi BPK itu dapat diselesaikan sebelum semester 2 APBN 2023 ini berakhir, apakah disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Interupsi, Pimpinan.

Sedikit Pimpinan, kami minta kepada Pak Menteri juga menindaki satu poin walaupun tidak terkait langsung dengan LKPP ya. Bahwa terkait adanya banyak temuan hukum ini, khususnya di Dirjen Minerba dan sudah lama dirjennya tidak definitif. Kami mohon agar bisa segera dipertimbangkan Dirjen Minerba ini dijadikan definitif.

Yang kedua, kalau memungkinkan kami berharap dengan sosok Irjen yang baru ini, Irjen mendapat Tupoksi yang lebih luas sedikit. Jadi bukan hanya khusus apa audit internal, tapi sedikit yang terkait eksternal komoditas, kalau itu makin *powerful*.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, itu juga tambahan masukan tadi Pak Menteri.

Tadi persetujuan kami atas LKPP sudah kami sampaikan dan akan kami tuangkan *entar* di kesimpulan rapat dan yang kedua ini poin yang sangat penting karena ini berkaitan dengan postur anggaran Republik Indonesia tahun 2024. Maka itu kami ingin sampaikan hasil kesimpulan, walaupun sebelum rapat kami sudah melakukan pertemuan internal untuk menyepakati, jangan yang ini. Untuk menyepakati angka-angka yang akan kita sampaikan ke Badan Anggaran, coba ditampilkan yang ini.

Baik, ini kita sepakati dan *entar* kita akan tuangkan di kesimpulan rapat tapi saat ini kita ambil kesimpulan. Di dalam nota keuangan untuk ICP, di dalam nota keuangan, itu ada diumumkan oleh presiden sebesar 80 US dolar per barel dan tadi kita sepakati bersama poksi-poksi partai di dalam, bahkan di dalam forum ini juga teman-teman sudah menyampaikan. Kita langsung ambil kesimpulan 82 US dolar per barel, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lifting migas, *lifting* migas itu terdiri dari 2, *lifting* minyak bumi yang disampaikan dalam nota keuangan APBN 2024 sebesar 25, 625. Tadi di dalam Ibu Ratna kita di sini mungkin ada sedikit perbedaan, di dalam *range* kesimpulan rapat kerja asumsi indikatif itu di 615-640, yang di dalam kesimpulan rapat tanggal 5 Juni. Jadi mungkin ini izin Bu Ratna karena yang berbeda hanya Bu Ratna dan Bu Andi, tapi *range*-nya masih masuk. Tadi diusulkan 640.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan, itu Kapoksi Fraksi Partai Kebangkitan ada di sana Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh ya Kapoksi. Tadi kita di dalam kita sepakati di angka 635, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sudah. Berikutnya *lifting* gas bumi, kita sepakati yang disampaikan di dalam nota keuangan 1.033 ribu BOEPD ya. Kita sepakati tetap ya 1.033 setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Selanjutnya, terus ke bawah *cost recovery* di nota keuangan 8,25 miliar US dolar, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Tetap, posisinya tetap.

Berikutnya volume BBM dan LPG bersubsidi terdiri dari 2, minyak tanah di dalam nota keuangan 0,580 juta kiloliter, setuju tetap sesuai dengan nota keuangan ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Minyak solar nota keuangan 19 juta kiloliter, setuju? Tetap, itu posisi tetap.

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

B, volume LPG 3 kilo *nah* di nota keuangan 8,03 juta kiloliter. Kita sepakati tadi hampir semua fraksi 8,5 juta kiloliter, setuju Pak Menteri?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Terus, oh juta metrik ton *sorry*.

Yang kedua, subsidi listrik, oh *nggak*, subsidi tetap minyak solar Rp1000,- per liter, tetap, kita sepakati tetap sesuai nota keuangan Rp1.000,- per liter, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Terakhir, subsidi listrik 73,24 triliun, tetap kita sepakati sesuai dengan nota keuangan tetap. Jadi 73,24 triliun, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Baik, untuk berikutnya kita langsung ke kesimpulan rapat, tadi hasil persetujuan Pak Menteri *kan*. Kita tuangkan dalam kesimpulan rapat atau sekaligus aja ya, sekaligus nota keuangan, *eh* apa pengantar RKAKL biar satu kesimpulan, Pak.

Silakan Pak Menteri ke agenda berikutnya, pengantar.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin sebelum ke nota keuangan kita tidak bahas ini lagi. Ada catatan *informatory* aja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Boleh Bu, silakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri dan seluruh jajaran,
Pak Ketua dan Pimpinan dan semua Anggota yang saya hormati.

Saya ada beberapa catatan saja secara keseluruhan tidak lagi ada masalah, tetapi mungkin ini menjadi atensi bersama saja. Yang pertama ini berkaitan dengan volume BBM dan LPG bersubsidi, minyak tanah kita naikan sampai dengan 0,58. Ini mungkin bisa menjadi perhatian Pak Menteri dan jajaran BPH Migas dan Pertamina.

Saya kemarin baru dari Reses itu keliling kurang lebih sekitar 6 kabupaten kota Bu, apa yang terjadi? Masyarakat, saya *nggak* tahu apakah ini dia berlaku sama atau tidak. Masyarakat yang mau beli minyak tanah hari ini 1 jerigen kecil yang 5 liter saja harus datang dengan KTP atau kartu keluarga, apakah ini benar? Dan itu bayangkan mereka memanfaatkan 5 liter itu untuk satu minggu.

Jadi kita menaikkan angka sampai 0,58 ini, Ibu kami mohon untuk rakyat kecil untuk yang mitan seperti begini tolong jangan dipersulit. Saya agak bingung aja di Kota Ambon tidak terjadi, kenapa di Aru kejadian dan beberapa kabupaten lain kejadian. Mereka mau beli minyak tanah harus tuntutan dulu itu KTP-nya ditunjukkan, apa-apa ini saya jadi agak bingung *gitu loh*. Jadi ini menjadi perhatian dan saya berharap mungkin ada informasi *clear* yang turun ke masyarakat, bahwa pembelian minyak tanah diperlakukan sewajarnya saja sebagai manusia, mereka kebutuhan hari-hari *kok*.

Yang berikut adalah untuk daerah-daerah yang belum migrasi mitan ke gas, saya minta mestinya Pak Menteri dengan Ibu Ketua BPH Migas, mestinya harus diberikan secara proporsional, *nggak* bisa diberlakukan sama rata untuk

apa namanya semua wilayah, mengapa? Karena sampai dengan hari ini kita *kan* belum mendapatkan kebijakan *clear* yang berkaitan dengan pemanfaatan LPG 3 kilogram.

Jadi harapannya Ibu mohon supaya daerah-daerah yang belum melakukan migrasi dari mitan ke gas, kalau bisa kuotanya dinaikkan karena pasca Covid dan yang lain-lain pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, tapi terbatas akses untuk mendapatkan minyak tanah terbatas, terbatas sekali.

Saya turun itu di beberapa titik itu saya sampai dimaki-maki Bu, saya terima aja karena ini memang fakta di lapangan. Mereka sampai banting KTP di muka saya, Bu Mercy beginikah caranya mengurus rakyat, untuk beli 5 liter aja mitan kita harus dipaksa bawa datang ini KTP, mesti ada NIK dan seterusnya, jadi ini jadi catatan.

Yang berikut untuk LPG 3 kilogram, untuk LPG 3 kilogram Pak, itu depot besar yang di Wayane itu Pak Menteri, *kan* sudah selesai dari kurang lebih 3 tahun yang lalu Pak, kita tunggu sampai dengan hari ini. Tahun kemarin Pak Menteri udah janji, tahun ini mestinya keputusan resmi untuk Indonesia Timur yang depot LPG-nya sudah siap sudah bisa menerima kebijakan LPG 3 kg.

Kita menikmati subsidi listrik, subsidi LPG 3 kilogram sama dengan daerah-daerah lain, sampai dengan hari ini belum ada realisasinya. Jadi ini tahun 2024 atas nama masyarakat Indonesia Timur Pak terutama, Maluku dan sekitarnya kami menuntut tanggung jawab negara supaya depot besar yang sudah siap itu betul-betul memang sudah bisa kita pakai benar dalam rangka implementasi LPG 3 kilogram berdasarkan subsidi yang kita putuskan bersama.

Setiap tahun ini angka subsidi LPG naik terus tapi kita yang di daerah timur yang belum melakukan migrasi hanya memandangi, padahal ini depot-depot besar ini udah siap.

Jadi harapan kami dalam waktu dekat atau kalau sesudah ini Pak Menteri bisa langsung menginformasikan per tahun 2024 kebijakan resmi, regulasi resmi untuk daerah-daerah yang depot LPG 3 kilogram-nya sudah siap, sudah bisa dilangsungkan migrasi dari mitan ke gas. Jadi ini mungkin menjadi catatan untuk Bapak-Ibu semua, berkenaan dengan urusan dua hal yang penting ini aja.

Sekian dan terima kasih, saya kembalikan Pak Bambang.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Bu Mercy.

Itu catatan penting dari Ibu Mercy untuk saudara-saudara kita, khususnya di dapilnya Bu Mercy.



Ya agenda berikutnya Pak Menteri mungkin menyingkat waktu ya Pak Menteri, saya kasih kesempatan Pak Menteri sampaikan aja poin besarnya aja Pak, yang besaran pagunya aja ini Pak karena *entar* juga akan kita alami di RDP Pak, menyingkat waktu biar langsung ke kesimpulan.

Terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Perkenankan kami sampaikan RKAK/L tahun 2024 Kementerian ESDM, anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp6,78 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan alokasi anggaran berdasarkan kesepakatan Raker dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 13 Juni yang lalu, yaitu sebesar Rp11,07 triliun. Jadi ini memang kita usulan dulu besar karena juga untuk bisa mendorong infrastruktur energi agar bisa dikembangkan.

Alokasi anggaran tahun 2024 itu sudah mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib ya, seperti gaji dan operasional kantor, penerimaan negara bukan pajak dan Badan Layanan Umum, dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, kemudian juga kegiatan prioritas nasional. Distribusinya adalah per unit organisasi Eselon 1:

1. Sekretariat Jenderal sebesar 545,86 miliar,
2. Inspektorat Jenderal sebesar 206,08 miliar,
3. Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar 1,774 triliun,
4. Ditjen Ketenaga Listrikan sebesar 360,59 miliar,
5. Ditjen Mineral dan Batubara sebesar Rp1,243 triliun,
6. Dewan Energi Nasional 56,86 miliar,
7. BPSDM ESDM sebesar 565,225 miliar, termasuk anggaran fungsi pendidikan sebesar 119,45 miliar,
8. Badan Geologi sebesar 1,265 triliun,
9. BPH Migas sebesar 231,16 miliar,
10. Ditjen EBTKE sebesar 448,28 miliar, dan
11. BPMA sebesar 78,93 miliar.

Sebesar 34,45% atau 2,33 triliun anggaran 2024 dialokasikan untuk infrastruktur bagi masyarakat dan survei sumber daya alam, fisik yang dilaksanakan, antara lain:

- 10) Penyelesaian pipa Cirebon-Semarang tahap 2, Batang-Cirebon sampai Kandanghaur Timur,
- 11) Konkit nelayan dan Konkit petani,
- 12) Bantuan pasang listrik baru,
- 13) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro,
- 14) Kemudian pembangkit listrik tenaga mini hidro,
- 15) Pembangkit listrik tenaga surya terpadu,
- 16) Revitalisasi EBT, dan
- 17) Pengeboran *slim hole* untuk geothermal.

Anggaran 2024 masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas sebesar 4,29 triliun, khususnya untuk pembangunan infrastruktur energi sesuai Raker bulan Juni yang lalu, antara lain:

- a. Untuk pipa gas bumi Dumai-Semangke,
- b. Jaringan transmisi 500 KV,
- c. Bantuan alat masak listrik,
- d. Pembangunan PLTN dan PLTMH, PJUTS, PLTS atap dan insentif konversi BBM ke motor listrik.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat, yang dapat kami sampaikan terkait dengan RKAKL Kementerian tahun 2024.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Menteri atas penyampaian usulan APBN tahun 2024.

Itu pagu yang diberikan itu baru pagu dari Bappenas ke dan Menteri Keuangan ya ini, *entar* teman-teman akan berjuang, akan berusaha sama *lah* kayak tahun-tahun sebelumnya ini pagu antara internal pemerintah belum bersepakat dengan DPR 6,7.

Untuk itu kita akan perjuangkan di Badan Anggaran dan juga dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi anggaran yang diusulkan adalah 6,7 yang diusulkan oleh Kementerian ESDM 6,776.152.351 rupiah.

Baik, pada langsung kita masuk ke kesimpulan.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kamis 31 Agustus 2023:

1. Komisi VII DPR RI menerima laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022 dan memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM RI yang kembali memperoleh predikat tertinggi, wajar tanpa pengecualian berturut-turut yang ke-7 kalinya.

Setuju ya?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ketua, ada masukan Ketua.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan.



F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ada anak kalimat sedikit aja, mempertimbangkan apa yang tadi dibicarakan oleh semua kita dan termasuk apa yang dicatatkan juga dengan jajaran kementerian dalam sejumlah rapat-rapat kita sampai dengan kasus yang menimpa salah satu dirjen dari kementerian kemarin.

Jadi ini kan sebenarnya tidak WTP instrumentalis aja ya yang sifatnya *methodist*, tetapi WTP di dalam semangat perkuatan *clean and good governance*. Jadi bukan saja dari sisi pelaporan fisik semua 100% terlapor dengan baik, tetapi juga dari sisi *good governance* dari aparaturnya juga ini yang harus kita mantapkan sehingga kita perkuatannya juga dalam aspek yang mengarah ke sana juga *gitu loh*.

Jadi usulan saya memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM RI yang kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian berturut-turut selama 7 kali, atas wajar, wajar tanpa pengecualian WTP berturut-turut 7 kali dengan terus, dengan keuangan dan status wajar tanpa pengecualian berturut-turut selama 7 kali dengan secara apa ya, ini koma yang pertama itu untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK, sebelumnya sesuai dengan oh ya sudah, atau kalau begitu di komanya saja dengan predikat wajar tanpa pengecualian berturut-turut yang ke-7 kalinya dalam rangka memperkuat *clean and good governance*. Itu saya kira semuanya udah mencakup, sistemnya, aparaturnya, SDM-nya semuanya, jadi bukan cuma laporan WTP-nya aja.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik.

1. Komisi VII 7 DPR RI menerima laporan keuangan Kementerian ESDM RI tahun anggaran 2022 dengan memberikan apresiasi, dan memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM yang kembali memperoleh predikat tertinggi dari BPK RI atas pemeriksaan keuangan dan kinerja karena pemeriksaan BPK itu ada dua ya Pak ya, pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja dengan predikat wajar tanpa pengecualian dan berturut-turut yang ke-7 kalinya dalam rangka memperkuat *clean and good goverment*.

Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menindaklanjuti seluruh temuan laporan, menindaklanjuti seluruh jangsan temuan, rekomendasi, seluruh rekomendasi dan menindaklanjuti, *oh* itu ya menindaklanjuti seluruh, seluruh rekomendasi atas temuan laporan keuangan *gitu* aja ya, atas temuan laporan keuangan tahun 2022 sebelum *gitu*, sebelum semester 2



2023 berakhir *gitu* ya Pak ya, maksudnya sampai akhir tahun Pak, sebelum semester 2 tahun 2023 udah.

Oke ya?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua supaya tidak mengulang rekomendasi BPK RI naik aja ke atas, yang di bagian bawahnya dihilangkan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik ya, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI atas temuan laporan keuangan tahun 2022 selambat-lambatnya, sebelum *gitu* aja, selambat-lambatnya sebelum semester 2 tahun 2023 berakhir, udah.

Oke, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Tiga, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam RAPBN, coba digedein dikit *nggak* kelihatan, *oke* ya saya ulang kembali poin ketiga ini poin penting karena ini harus segera menjadi postur anggaran.

3. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI terkait asumsi, terkait asumsi dasar sektor ESDM dalam APBN, RAPBN tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
 - 1) ICP, kita sepakati 82 US dolar per barel,

Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Oh *nggak* usah diketok satu-satu *kan* udah ya, udah ya kita sepakati ini semua ya, sepakat ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM di RKAK/L Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.776.152.351.000,0 dan akan didalami bersama Eselon 1, dan akan didalami ya dan akan dibahas, dan akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh Eselon 1 ya, dan akan dibahas dalam rapat dengar pendapat

bersama Eselon 1 Kementerian ini, bersama dengan seluruh itu terus, dibahas, dan akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, dengan Komisi VII DPR RI, Komisi VII DPR RI dengan seluruh Eselon 1 Kementerian ESDM RI.

Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI meminta, belum setuju Bu?

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Setuju tapi kalau bagus tambahan yang memperjuangkan, memperjuangkan yang 11 koma, kalau boleh.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik.

5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 7 September 2023.

Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Menteri setelah kita melakukan pembahasan secara menyeluruh dari 3 agenda yang ada, LKPP, asumsi dan juga pengantar APBN kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan *closing statement*.

MENTERI ESDM RI (Ir. ARIFIN TASRIF):

Baik.

Bapak Pimpinan, Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang telah melakukan pembahasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022. Kami akan segera melakukan



langkah-langkah yang diperlukan agar sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang telah membahas dan menetapkan asumsi dasar sektor ESDM pada RAPBN tahun anggaran 2024. Semoga apa yang kita telah tetapkan hari ini dapat menjadi dasar penghitungan APBN tahun anggaran 2024.

Pada kesempatan ini juga kami telah menyampaikan tadi pengantar RKAK/L Tahun Anggaran 2024, yang mana akan segera dilakukan pembahasan bersama dengan para Eselon 1 Kementerian ESDM dan kami berharap agar dapat, hasilnya dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara.

Adapun untuk masukan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Anggota sepanjang rapat kerja hari ini akan menjadi perhatian utama kami dan kemudian jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Dewan akan kami sampaikan pada waktu yang tadi telah ditetapkan.

Terima kasih.

*Billahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif beserta seluruh jajaran Eselon 1 dan juga kepada Kepala BPH dan juga 2 Dirut Badan Usaha Milik Negara, Pak Dirut PLN dan juga Dirut Pertamina atas kerjasamanya yang baik dalam rapat ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.35 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos
NIP. 196903131990032002

